

PENYUSUNAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2019

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

OPD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		509.781.357	492.218.201	96,55
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	44.400.000	28.437.601	64,05
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.500.000	93.250.000	99,73
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.205.000	61.205.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.100.000	14.100.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.138.367	56.138.275	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.219.990	28.219.990	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.726.765	99,88
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.320.000	96,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.205.000	41.260.570	97,76
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	102.775.000	102.675.000	99,90
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	53.000.000	52.885.000	99,78

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.820.000	377.418.819	97,32
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	16.000.000	15.800.000	98,75
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.500.000	101.624.200	99,15
14.	Pengadaan Mobiler	57.700.000	57.185.000	99,11
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.965.000	99,83
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	203.620.000	182.844.619	89,80
III.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.019.685.825	1.922.904.264	96,17
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	1.144.915.005	1.079.678.715	94,30
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	346.444.966	323.535.688	93,39
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	15.429.325	14.975.520	97,06
20.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	385.422.333	382.316.228	99,19
21.	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	83.802.790	79.519.490	94,89
22.	Kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	43.671.406	42.878.623	98,18
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	81.403.303	81.189.730	99,62
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	71.590.000	71.429.000	99,78
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	9.813.303	9.760.730	99,46
	TOTAL	3.010.690.485	2.873.731.014	95,45

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Dialokasikan dana sebesar Rp509.781.357,00 Realisasi Rp492.218.201,00 atau (96,55 %) dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
Menampung biaya belanja rekening bulanan telepon, air dan listrik dgn pagu anggaran sebesar Rp44.400.000,00 realisasi sebesar Rp28.437.601,00 (64,05 %).
- 2). *Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*
Menampung biaya belanja jasa administrasi keuangan untuk satu tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp93.500.000,00 realisasi sebesar Rp93.250.000,00 (99,73 %)
- 3). *Penyediaan jasa kebersihan kantor*
Menampung belanja Jasa kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor serta pekarangan untuk satu tahun (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp61.205.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.205.000,00 atau (100,00%).
- 4). *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*
Menampung belanja perbaikan peralatan kerja; Laptop 10 unit, Mesin Fotokopi 1 unit, Komputer 10 unit, printer 13 unit AC 10 unit dan Genset 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp14.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.100.000,00 atau (100,00%).
- 5). *Penyediaan alat tulis kantor*
Menampung belanja keperluan alat tulis kantor untuk 1 tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp56.138.367,00 dengan realisasi sebesar Rp56.138.275,00 atau (100,00%).
- 6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.*
Menampung biaya cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama satu tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp28.219.990,00 dengan realisasi sebesar Rp28.219.990,00 atau (100,00 %).
- 7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*
Menampung keperluan alat-alat listrik kantor selama 1 tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp9.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.726.765,00 atau (99,88%).

- 8). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan*
Menampung kebutuhan media kantor (Langganan Surat Kabar Singgalang, Haluan dan Padang Ekspres) selama 1 tahun (12 bulan) dan buku-buku penunjang pengawasan pagu anggaran sebesar Rp4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.320.000,00 atau (96%).
- 9). *Penyediaan makanan dan minuman*
Menampung kebutuhan makan, minum harian pegawai, rapat dan tamu kantor, pagu anggaran sebesar Rp42.205.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.260.570,00 atau (97,76 %).
- 10). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*
Menampung belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka rapat koordinasi pengawasan, rapat koordinasi teknis pengawasan, pemutakhiran data pengawasan, rapat koordinasi kepegawaian, konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, dan koordinasi pengawasan serta pelaporan ke Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, alokasi pagu anggaran sebesar Rp102.775.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp102.675.000,00 atau (99,90 %).
- 11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah*
Menampung belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam monitoring dan evaluasi pengawasan serta pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Obrik Pemeriksaan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp53.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp52.885.000,00 atau (99,78 %).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialokasikan dana sebesar Rp399.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp377.418.819,00 atau (97,32%) dengan kegiatan sebagai berikut;

- 1). *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*
Menampung belanja pengadaan perlengkapan Kantor (2 unit Printer), alokasi pagu anggaran sebesar Rp16.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp15.800.000,00 atau (98,75%).
- 2). *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*
Menampung belanja pengadaan peralatan gedung kantor (1 unit Scanner dan 1 unit mesin Foto kopy), dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.500.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp101.624.200,00 (99,15%)
- 3) *Pengadaan Peralatan Meubiler*
Menampung belanja pengadaan Meubiler berupa peralatan gedung kantor (3 unit Meja Esselon III dan 3 unit Kursi Esselon III, 10 Unit Kursi, 4 unit Lemari), dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.700.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp57.185.000,00 (99,11%)

- 4). *Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor*
Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, perbaikan atap dan loteng, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 (100,00%)
- 5). *Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas operasional*
Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, service, suku cadang, bahan bakar minyak dan pembayaran STNK dengan alokasi anggaran sebesar Rp203.620.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp182.844.619,00 (89,80%)

Urusan Pilihan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dianggarkan dana sebesar Rp2.019.685.825,00 dengan realisasi sebesar Rp1.922.904.264,00 atau (96,17%) dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala*
Menampung belanja operasional pemeriksaan berkala/reguler berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2019 dengan penerbitan LHP sebanyak 167 berkas, pagu anggaran sebesar Rp1.144.915.055,00 dengan realisasi sebesar Rp1.079.678.715,00 atau (94.30%).
- 2). *Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah*
Menampung biaya operasional pemeriksaan kasus/ khusus, dengan penerbitan LHP 101 berkas, pagu anggaran sebesar Rp346.444.966,00 dengan realisasi Rp323.535.688,00 atau (93,39%).
- 3). *Inventarisasi Temuan Pengawasan*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan pemeliharaan Aplikasi SIM-HP dengan pagu anggaran sebesarRp15.429.325,00 dengan realisasi sebesar Rp14.975.520,00 atau (97,06%).
- 4). *Tindak lanjut hasil temuan pengawasan*
Menampung biaya operasional pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan objek pemeriksaan, pagu anggaran sebesar Rp385.422.333,00 dengan realisasi sebesar Rp382.316.228,00 atau (99,19%).
- 5). *Review Dokumen Perencanaan dan Pelapooan*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp83.802.790,00 dgn realisasi sebesar Rp79.519.490,00 atau (94,89%).

6). *Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp43.671.406,00 dengan realisasi sebesar Rp42.878.623,00 atau (98,18%).

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur.

Dianggarkan dana sebesar Rp81.403.303,00 dengan realisasi sebesar Rp81.189.730,00 atau (99,62%) dengan kegiatan sebagai berikut :

1). *Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*

Menampung biaya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp71.590.000,00 dengan realisasi sebesar Rp71.429.000,00 atau (99,78%).

2). *Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.*

Menampung biaya pelatihan khusus aparatur pengawasan pada kantor sendiri dengan anggaran sebesar Rp9.813.303,00 dengan realisasi sebesar Rp9.760.730,00 atau (99,46%) .

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Permasalahan Yang Dihadapi

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Pengawasan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (objek). Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 Km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Mobilitas yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sudah barang tentu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas, selama tahun 2019 ditemui beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
- b). Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- c). Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN)

Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Menyardarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- c). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- d). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

Painan, 20 Januari 2020

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom.

Pembina Tk.I.

NIP. 19670101 199003 1 013

DATA CAPAIAN MAKRO TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

OPD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		KET
			2018	2019	
A	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
	Indikator :				
1.	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
	a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara:				
	- Reguler	Obrik	199	167	
	- Khusus	Obrik	59	99	
	- Kasus	Obrik	18	10	
	b. Jumlah temuan yang terinventarisir:				
	- Reguler	Temuan	720	362	
	- Khusus	Temuan	74	99	
	- Kasus	Temuan	18	10	
	c. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti:				
	- Reguler	Temuan	579	230	
	- Khusus	Temuan	-	99	
	- Kasus	Temuan	18	-	
	d. Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah.	Laporan	1	5	
	e. Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Laporan	1	1	
	f. Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD	Laporan	2	2	
	g. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi SPIP	Kali	-	-	

2.	Terlaksananya pemeriksaan dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan				
	a. Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan	Orang	32	20	
	b. Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri	Angkatan	50	45	

A. URUSAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan pengawasan maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah **Penunjang Urusan**.

B. INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	BB	BB	BB	A
3.	Level Maturitas SPIP	1,97	1,97	2	3	3	3	3

Painan, 20 Januari 2020

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



ANDA YANUAR, S.Kom.

Pembina Tk.I.

NIP. 19670101 199003 1 013

1. OPD Pelaksana: INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Urusan yang dilaksanakan:

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

A. Program dan Kegiatan (Jumlah Program sebanyak 4 Program dan Kegiatan sebanyak 24 Kegiatan)

Rincian Program dan kegiatan :

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKA T CAPAIA N (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELI HARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHA- RAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	166.500.000	2.647.990.485	20.000.000	176.200.000	3.010.690.485	166.250.000	2.532.871.814	-	174.609.200	2.873.731.014	95,47
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.500.000	364.281.357	-	-	509.781.357	145.250.000	346.968.201	-	-	492.218.201	96,55
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	-	44.400.000	-	-	44.400.000	-	28.437.601	-	-	28.437.601	64,05
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.500.000	-	-	-	93.500.000	93.250.000	-	-	-	93.250.000	99,73
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52.000.000	9.205.000	-	-	61.205.000	52.000.000	9.205.000	-	-	61.205.000	100
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	14.100.000	-	-	14.100.000	-	14.100.000	-	-	14.100.000	100
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	56.138.367	-	-	56.138.367	-	56.138.275	-	-	56.138.275	100
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	28.219.990	-	-	28.219.990	-	28.219.990	-	-	28.219.990	100
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	9.738.000	-	-	9.738.000	-	9.726.765	-	-	9.726.765	99,88
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	4.320.000	-	-	4.320.000	96,00

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	42.205.000	-	-	42.205.000	-	41.260.570	-	-	41.260.570	97,76
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	-	102.775.000	-	-	102.775.000	-	102.675.000	-	-	102.675.000	99,90
11.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	53.000.000	-	-	53.000.000	-	52.885.000	-	-	52.885.000	99,78
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.000.000	182.620.000	20.000.000	176.200.000	399.820.000	21.000.000	181.809.619	-	174.609.200	377.418.819	97,32
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	-	16.000.000	16.000.000	-	-	-	15.800.000	15.800.000	98,75
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	102.500.000	102.500.000	-	-	-	101.624.200	101.624.200	99,15
14	Pengadaan Meubiler	-	-	-	57.700.000	57.700.000	-	-	-	57.185.000	57.185.000	99,11
15	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	19.965.000	-	-	19.965.000	99,83
16	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	21.000.000	182.620.000	-	-	203.620.000	21.000.000	161.844.619	-	-	182.844.619	89,80
IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	2.019.685.825	-	-	2.019.685.825	-	1.922.904.264	-	-	1.922.904.264	96,17
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	-	1.144.915.005	-	-	1.144.915.005	-	1.079.678.715	-	-	1.079.678.715	94,30
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	-	346.444.966	-	-	346.444.966	-	323.535.688	-	-	323.535.688	93,39
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	15.429.325	-	-	15.429.325	-	14.975.520	-	-	14.975.520	97,06
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	83.802.790	-	-	83.802.790	-	79.519.490	-	-	79.519.490	99,19
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	-	385.422.333	-	-	385.422.333	-	382.316.228	-	-	382.316.228	94,89

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	-	43.671.406	-	-	43.671.406	-	42.878.623	-	-	42.878.623	98,18
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	-	81.403.303	-	-	81.403.303	-	81.189.730	-	-	81.189.730	99,62
23	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	-	71.590.000	-	-	71.590.000	-	71.429.000	-	-	71.429.000	99,78
24	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	-	9.813.303	-	-	9.813.303	-	9.760.730	-	-	9.760.730	99,46
	TOTAL	166.500.000	2.647.990.485	20.000.000	176.200.000	3.010.690.485	166.250.000	2.532.871.814	-	174.609.200	2.873.731.014	95,45

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan masih kurang/ada yang tidak layak pakai.

1. Kondisi Kendaraan roda 4 (empat) ada 4 (empat) unit dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Esselon II.

- 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat), Esselon III, masih ada kekurangan sebanyak 2 (dua) unit karena Esselon III ada 5 (lima) orang. 1 (satu) unit untuk pengawasan dan 1 (satu) unit untuk Operasional Kantor.

2. Laptop, Komputer dan printer masih kurang

3. Mobieur masih kurang sudah banyak yang tidak layak lagi.

4. Kondisi Gedung Kantor; belum adanya Toilet Umum.

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus..
- Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)..
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

2. Solusi:

- Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Diklat Fungsional.
- Menyadarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan cara jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan objek pemeriksaan dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti : penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia.

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan:

- Dari keseluruhan capaian sasaran , dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan telah mengacu kepada program yang ditetapkan dalam Renstra.

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kaelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 19681017 198903 1 003	Inspektur	Eselon II b	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V
2.	Emilaloviza, S.Sos., M.M. NIP. 19670927 198903 2 001	Sekretaris	Eselon III a	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	V	V
3.	Sudarwin. S.P.M.Si NIP. 19681216 199803 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah I	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
4.	Hermawan. S.T. NIP. 1780306 200501 1 003	Inspektur Pembantu Wilayah II	Eselon III a	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
5.	Amrizal, S.E., M.M. NIP. 17720307 200212 1 002	Inspektur Pembantu Wilayah III	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
6.	Afrijo, S.H. NIP. 19680212 198903 1 005	Inspektur Pembantu Wilayah VI	Eselon III a	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
7.	Rio Syandra, S.S.T., S.T. NIP. 19810707 200501 1 010	Kasubag Umum & Kepegawaian	Eselon IVa	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V
8.	Siti Wahyu Widayat, A.Md. NIP. 19700912 199303 2 001	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Eselon IVa	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
9.	Zurwin NIP. 19620614 198703 1 002	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Eselon IVa	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
10.	Yefrial, S.H., M.M. NIP. 19671028 199003 1 007	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
11.	Irzal Aziz, S.E., M.M. NIP. 19620928 198903 1 004	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
12.	Nurlaili. SH.MM NIP. 19630112 198903 2 002	Pengawas Pemerintahan Madya	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
13.	Azwir Asri.SH NIP. 19630607 198903 1 011	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
14.	Yandri, S.H., M.M. NIP. 19691107 198903 2 002	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
15.	Irma Yulia, S.Kom.M.M NIP. 19720721 199803 2 003	Auditor Kepegawaian	Fungsional Audiwan	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
16.	Zulfa Hartati, S.E, M.M NIP. 19700401 199303 2 002	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
17.	Erdianto. BTR, SH., M.M. NIP. 19641012 198603 1 010	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-
18.	Medi Yuherman, S.H. NIP. 19700201 199303 1 005	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
19.	Eko Sutoyo, S.E NIP. 19621105 199003 1 004	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
20.	Syaftinol Martin, S.H NIP. 19621005 199301 1 002	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
21.	M. Darlis, S.Sos Nip. 19850318 201001 1 026	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
22.	Nurhayati, S.H NIP.19670910 198903 2 003	Auditor Kepegawaian Muda	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
23.	Mamik Supriyati, S.E NIP. 19840415 200902 2 009	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
24.	Yudha Herawan, S.E. NIP. 19870711 201001 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
25.	Rivvi Reny Midona, S.T NIP. 19800126 200801 2 001	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
26.	Syafridal, S.ST NIP. 19750710 200604 1 012	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
27.	Tri Marlisa, S.T NIP. 19850318 201001 2 026	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
28.	Desrianti, S.ST NIP. 19771228 200501 2 005	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
29.	Yeni Oktavera Basri, S.E NIP.19821011 201101 2 015	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
30.	Andri Milda, S.E NIP.19860418 200902 2 021	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
31.	Arwen Chandra, S.E NIP. 19850423 200604 1 002	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
32.	Ibrahim, S.H NIP. 19741112 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
33.	Junaidi, S.E NIP.19780103 20100 1 009	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
34.	Donis Prianto, S.H NIP.19761028 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
35.	Jefri Darma, S.H NIP. 19830204 200212 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
36.	Dian Permana Putra, S.E Nip. 19850512 200701 1 003	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
37.	Rory Asmadia, S.E. NIP. 19810402 201407 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
38.	Rostina Yusra.S.IP NIP. 19700914 200604 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
39.	Fahrizal.S.IP NIP. 19760405 200604 1 016	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
40.	Syafrianto NIP. 19780426 200701 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
41.	Rio Alfino, S.Kom NIP. 19870310 201502 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
42.	Alpian NIP. 19750806 200212 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
43.	Yenni Suryati NIP. 19620227 200012 2 001	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
44.	Nova Susanti, A.Md NIP. 19761105 201101 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
45.	Zulbakri, S.T. NIP. 19860605 201101 1 017	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
46.	Endang Kos Lendra, A.Md NIP. 19820314 201212 2 001	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
47.	Megaliza.A NIP. 19840612 200701 2 003	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
Total				-	3	3	29	12	30	17	-	2	29	14	-	1	2	16


 Paiman, 20 Januari 2020
 INSPEKTUR
AHDA YANUAR, S.Kom.
 NIP. 19670101 199003 1 013
 PESISIR SELATAN

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Inspektorat

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar Lembaga	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah Mou yang masih berlaku pada Tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada Tahun 2019, sebanyak 0 Mou.	0 Mou	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 13 temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 12 Temuan.	92,31%	
13	TEROBOSAN /INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2019	Penghargaan yang diterima sebanyak 1 penghargaan, atas penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat dengan level 3	1 Penghargaan	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : PESIR SELATAN
 NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0 %	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada SOP	Jumlah SOP Perangkat Daerah sebanyak 35 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengurusan Surat Keluar 2. SOP ttg Pengurusan Surat Masuk 3. SOP ttg penyusunan DUK dan Bezzeting 4. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala 5. SOP ttg Pengajuan Cuti Pegawai 6. SOP ttg Pengajuan Surat Tugas 7. SOP ttg Pengajuan	Ada 35 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Permintaan ATK Perangkat Daerah 8. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat 9. SOP ttg Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 10. SOP ttg Penyusunan RKA dan DPPA 11. SOP ttg Penentuan Data Keuangan pada SIPKD 12. SOP ttg Pengajuan Permintaan GU 13. SOP ttg Penyusunan Renstra 14. SOP ttg Penyusunan LKPj dan LPPD 15. SOP ttg Penyusunan LAKIP 16. SOP ttg Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 17. SOP ttg Penyusunan Laporan Berkala Kegiatan Pengawasan 18. SOP ttg Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 19. SOP ttg Pemeriksaan Reguler 20. SOP ttg Prosedur Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah		tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SOP Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Kabupaten Pesisir Selatan. 21. SOP ttg Pelaksanaan Tindak Lanjut 22. SOP ttg Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan 23. SOP ttg Penolakan Pemeriksaan oleh Auditi 24. SOP ttg Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 25. SOP ttg Penyusunan Peta Kompetensi 26. SOP ttg Reviu Periodik Anggaran 27. SOP ttg Ekspose Internal Temuan Pemeriksaan 28. SOP ttg SIMHP 29. SOP ttg Diklat dengan Biaya Sendiri 30. SOP ttg Rapat Rutin dan Rapat Bulanan 31. SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri 32. SOP ttg Layanan Konsultasi 33. SOP ttg Mutasi Pejabat Fungsional Antar Irban 34. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 35. SOP ttg Penerbitan SKP		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dngan Penyelenggaraan Urusan Pengawasan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perbup) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Pengawasan	Ada PERBUP	Jumlah PERBUP Inspektorat Tahun 2019 : a. PERBUP Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 ttg Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan. b. PERBUP Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 ttg Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. c. PERBUP Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2019 ttg Pedoman Umum Penanganan Pengadua Masyarakat terhadap Instansi Pemerintah Daerah. d. PERBUP Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ada, 4 PERBUP	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100 %	DUK tahun 2019 terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Nama jabatan fungsional antara lain : Auditor, P2UPD dan Audiwan.	Ada	Nama-Nama Jabatan Fungsional yang ada, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 47 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.842 personil	0,69 %	Sumber datapada kondisi terakhir/update Tahun 2019
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	44,44 %	Sumber datapada kondisi terakhir/update Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	Sumber datapada kondisi terakhir/update tahun 2018
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah -DPA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja . 3. RKA/RPKA. 4. DPA/DPPA.	4 jenis dokumen	Sumber data Inspektorat
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	80 %	Sumber datadokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	80%	Sumber data dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018
		Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Belanja Inspektorat, sebesar Rp7.792.269.571,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp1.860.991.871.831,39	0,42 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir.
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100 %	- Total Realisasi Belanja Inspektorat, sebesar Rp7.627.285.552,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp1.860.991.871.831,39	0,41%	Sumber data dari Realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari Total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Inspektorat, sebesar Rp2.873.731.014,- - Total Realisasi Belanja Inspektorat, sebesar Rp7.627.285.552,-	0,38%	Sumber data dari Realisasi APBD tahun terakhir

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya)

1. INSPEKTORAT
2. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KET
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	
11.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
14.	Pengadaan Mobiler	
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urutan I	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	16	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Jenis dokumennya antara lain: 1. 1. KIB A s.d. F 2. Buku Inventaris 3. Belanja Modal Tahun 2019	Ada	Lampiran Laporan Aset Sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	17	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp199.811.085,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp4.271.161.730,-	4,68 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana masyarakat	18	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : - Papan Pengumuman - Kotak Pengaduan - Lapor Sp4n	Jumlahnya sebanyak 3 jenis.	Papan Pengumuman informasi untuk PNS dan Kotak Pengaduan dari PNS/Masyarakat
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	19	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Surat Ketetapan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik.	Tidak adanya survey kepuasan masyarakat terhadap publik,	Tidak Ada	Tidak Adanya Survey kepuasan tentang pelayanan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.


 Paimon, Januari 2020
 Inspektur,
AHDA YANUAR, S.Kom.
 NIP. 19670101 199003 1 013

III.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	

3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.

NO.	URAIAN	JUMLAH														
		PNS											KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	S.2	S.1	D.III	SLTA
1	STRUKTURAL	1	3	4	1	3	2	4	3	0	-	-	4	11	3	3
2	FUNGSIONAL	1	4	2	4	8	6	1	-	-	-	-	8	18	0	-
JUMLAH			8	5	9	8	11	6	2	1	-	-	10	32	4	4

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.366.278	553.370.443	97,19
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	42.900.000	35.002.648	81,59
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.200.000	90.350.000	99,07
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.205.391	57.205.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.350.000	19.350.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.655.923	31.655.900	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.041.964	40.041.900	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.735.000	99,97
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.320.000	96,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.290.000	39.592.500	93,62
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	161.350.000	161.212.495	99,91

11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	47.425.000	47.295.000	99,73
12.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	21.710.000	17.610.000	81,11
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.242.000	208.386.287	86,02
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	190.242.000	156.386.287	82,20
III.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.603.523.158	2.471.581.456	94,93
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	1.294.560.535	1.195.383.750	92,34
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	778.578.673	759.905.380	97,60
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	20.345.000	20.239.176	99,48

20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	442.699.450	435.158.650	98,30
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	16.886.500	14.336.500	84,90
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	23.362.500	21.662.500	92,72
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	27.090.500	24.895.500	91,90
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	216.201.247	192.377.331	88,98
24.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	199.785.000	178.586.331	89,39
25.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	16.416.247	13.791.000	84,01
	TOTAL	3.631.332.683	3.425.715.517	94,34

5. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Ungul, Agamis dan Sejahtera"

Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “ *Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan reponsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat* ”

6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCIKUPI ATAU LAINNYA) SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG ANTARA LAIN :

- Bangunan Gedung Kantor:
Bangunan Gedung Kantor 2 (dua), Bangunan Tempat Ibadah 1 (satu), Bangunan Parkir 1 (satu), Pagar Gedung kantor 1 (satu).
- Alat-Alat Angkutan:
Kendaraan Roda 4; 4 (empat) unit, Kendaraan Roda 2; 6 (enam) unit.
- Alat Kantor:
Mesin Tik Manual 1 (satu) unit, Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit, Mesin Absensi 1 (satu) unit, Perangkat CPE 1 (satu) paket.
- Alat Rproduksi (Penggandaan):
Alat Mesin Foto Kopi/Penggandaan 1 (satu) unit.
- Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor:
Lemari Besi/Metal 2 (dua) unit, Filling Besi/Metal 11 (sebelas) unit, Brankas 1 (satu) unit.
- Alat Kantor Lainnya:
UPS 13 (tiga belas) unit, Mesin Penghancur Kertas 2 (dua) unit, Meja Biro 3 (tiga) unit, Kursi Biro 1 (satu) unit, Generator Set 1 (satu) unit, Stabilizer 9 (lima) unit, Papan informasi 8 (delapan) unit, Merawa 1 (satu) paket.
- Alat Rumah Tangga:
Lemari Kayu 6 (enam) unit, Rak Kayu 1 (satu) unit, Meja besi/Metal 1 (satu) unit, Meja Rapat 1 (satu) unit, Meja Resepsionis 1 (satu) unit, Kursi Rapat 6 (enam) unit, Kursi Tamu 8 (delapan) unit, Kursi Putar 8 (delapan) unit, Kursi Biasa 3 (tiga) unit, Lemari Panjang 1 (satu) unit, Kursi tunggu 6 (enam) unit, AC 11 (sebelas) unit, Kipas Angin 6 (enam) unit, Televisi 7 (tujuh) unit, Stabilisator 1 (satu) unit, Camera Video 1 (satu) unit, Gorden 2 (dua) paket, Pompa Air 1 (satu) unit

- Komputer:
Komputer 10 (sepuluh) unit, Lap Top 16 (enam belas) unit, I PAD 2 (dua) unit, Printer 15 (lima belas) unit, Scanner 2 (dua) unit, Hard Disk External 3 (tiga) unit, Server 1 (satu) unit.
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat:
Meja Kerja 16 (enam belas) unit, Kursi Kerja 6 (enam) unit, Kursi Rapat 1 (satu) paket, Lemari Arsip 7 (tujuh) unit.
- Alat Studio dan Alat Komunikasi:
Proyektor+Attachment 1 (satu) unit, Sound System 1 (satu) unit, Handycam 1 (satu) unit, Camera Digital 5 (lima) unit, Telepon (PABX) 1 (satu) unit, Faximile 1 (satu) unit.
- Buku Perpustakaan:
Buku Ilmu Pengetahuan Umum 160 (seratus enam puluh) buah, Buku Peraturan Perundang-undangan 261 (dua ratus enam puluh satu) buah.

Sarana dan Prasarana yang ada dilingkup Inspektorat, masih kurang memadai dan tidak layak.

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Masih belum seimbangny jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
- b). Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- c). Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

II. Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a. Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .

- b. Menyardarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatasi dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- c. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

8. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN

- Perlunya tambahan sarana operasional dengan kondisi baik.
- Perlunya tambahan SDM yang berkompetensi.
- Perlunya tambahan kesejahteraan ASN.

Painan, 20 Januari 2020

Inspektur

Kabupaten Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom.

Pembina Tk.I.

NIP. 19670101 199003 1 013

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
BIDANG : PENUNJANG

1. Forum Koordinasi : -
2. Materi Koordinasi : -
3. Instansi Vertikal yang terlibat : -
4. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan : -
6. Hasil dan Manfaat Koordinasi : -
7. Tindak lanjut Hasil Koordinasi : -
8. SDM Pendukung Program dan Kegiatan:
 - Jumlah Pegawai : -
 - Kualifikasi Pendidikan : -
 - Pangkat atau Golongan : -
 - Jumlah Pejabat Struktural : -



KERJASAMA ANTAR DAERAH

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bidang : -

1. Daerah yang diajak kerjasama : -
2. Dasar Hukum : -
3. Bidang Kerjasama; -
4. Nama Program dan Kegiatan : -
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Antar daerah: -
6. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan (Pegawai yang menangani kerjasama) : -
7. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
8. Jangka Waktu kerjasama : -
9. Hasil (Output) dari Kerjasama : -
10. Permasalahan dan Solusi : -
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

Painan, 20 Januari 2020

INSPEKTUR
AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013.



KERJASAMA ANTAR DAERAH

A. SKPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

B. Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	NAMA BADAN KERJASAMA*	PARA PIHAK	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	DASAR HUKUM PELAKSANAAN	HASIL KERJASAMA	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH (TKKSD)	KENDALA/ MASALAH
	N		I		H		I	L	

20 Januari 2020

 INSPEKTUR
 AHDA YANUAR, S.Kom
 NIP. 19670131 199003 1 013

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
I.	Program.....						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	N	I	H	I	L		
II.	Program						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	Total						

- A. Mitra yang diajak Kerjasama : -
- B. Dasar Hukum : -
- C. Bidang Kerjasama : -
- D. Nama Kegiatan : -
- E. Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga : -
- F. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan : -
- G. Sumber dan jumlah anggaran : -
- H. Jangka Waktu Kerjasama : -
- I. Hasil (Output) dari Kerjasama : -
- J. Permasalahan dan Solusi : -
1. Permasalahan:
 - -
 2. Solusi:
 - -

TUGAS PEMBANTUAN

OPD Pelaksana

: INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

i. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

BIDANG : PENUNJANG

- A. Dsar Hukum :-
- B. Instansi Pemberi Tugas :-
- C. Perangkat Daerah Pelaksana :-
- D. Program dan Kegiatan :-
- E. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :-
- F. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :-
- G. SDM Pendukungprogram dan kegiatan :-
- H. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan :-
- I. Permasalahan dan Solusi :-
- J. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan :-
- K. Tabel Program dan Kegiatan :-

NO.	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
I.	Program.....						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	N	I	H	I	L		
II.	Program						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	Total						

ii. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (KABUPATEN PADA KECAMATAN ATAU NAGARI)

- 1. Dasar Hukum
- 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 4. SDM Pendukung
- 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan